

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Agung Satria Mandala (2022) yang berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengelolaan sampah pemerintah dinilai sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian Agung Satria Mandala lebih menekankan pada implementasi peraturan daerah dari perspektif hukum Islam (siyasah dusturiyah), sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan di lokasi penelitian yang berbeda. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

2. Muhammad Syarif (2022) yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)*”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya batas maksimal pembuangan sampah per rumah tangga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta ketidakjelasan jadwal pengangkutan sampah. Selain itu, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengalami kelebihan kapasitas (overload) juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah turut memperkuat kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Penelitian Muhammad Syarif menggunakan pendekatan hukum lingkungan dalam menganalisis kebijakan, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif administrasi publik. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan dan partisipasi masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Anderson dalam (Budi Winarno, 2014:19) mengungkapkan bahwa istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Jones merumuskan kebijakan sebagai suatu *behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems*" yaitu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye dalam (Budi Winarno, 2014:20) definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini dianggap tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Tresiana (2017:6) sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas Parker mengkonsepsikan kebijakan publik dalam Novita tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu

dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan kritis.

Menurut Sahya Anggara (2014:36) tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam Faried Ali (2017:9) suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik jika memiliki empat unsur, yaitu:

- a. Adanya pernyataan kehendak. Berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak.
- b. Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau organisasi, terlepas dari mana kewenangan diperoleh.
- c. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
- d. Adanya tujuan yang dikehendaki. Mengandung arti yang luas, tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dan mempertimbangkan peran dan status melakukan sesuatu.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat berpendapat bahwa kebijakan publik adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu permasalahan kepentingan orang banyak dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi kenyataannya, implementasi dalam tahap kebijakan publik ini menjadi begitu penting karena suatu kebijakan dapat tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Grindle dalam (Novita Tresiana, 2017:46) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Deddy Mulyadi (2016:56) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Jan Merse dalam (Arifin Tahir, 2015:93) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu: a) Informasi, b) isi

kebijakan, c) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan d) pembagian potensi.

a. Tahap Implementasi

Menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016:159) tahap Implementasi Kebijakan, yaitu:

- 1) Implementasi strategi (pra implementasi)
- 2) Pengeorganisasian (organizing)
- 3) Penggerakan dan kepemimpinan
- 4) Pengendalian

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Beberapa faktor eksternal yang mempersulit Implementasi suatu kebijakan menurut Deddy Mulyadi (2016:62) sebagai berikut:

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terjadi.
- 2) Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (Attitude) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsung kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu dilaksanakan.
- 4) Terjadinya penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang tidak diharapkan tidak cukup.
- 5) Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Rippley dan Franklin

Ripley dan Franklin dalam (Arifin Tahir, 2015:95-96) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya,
- 2) Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah,
- 3) Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementator kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
- 2) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
- 3) Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

b. Model Warwic

Menurut Warwic dalam Arifin Tahir (2015:93-94) mengatakan bahwa: Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Kemampuan Organisasi,
- 2) Informasi,
- 3) Dukungan, dan
- 4) Pembagian potensi.

Selanjutnya keempat masing-masing faktor di atas diuraikan sebagai berikut;

- 1) Kemampuan organisasi; implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:
 - a) Kemampuan teknis,
 - b) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar unsur yang terkait,
 - c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Informasi; faktor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
- 3) Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- 4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

c. Model Jan Merse

Model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Merse dalam (Arifin Tahir, 2015:93), menegaskan bahwa:

"Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi Kebijakan, 3) dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program".

Penegasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

d. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159). Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Implementasi akan efektif jika para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan. Keberhasilan komunikasi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi).

- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan disposisi. Disposisi atau sikap. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini

merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

- c) Insentif; Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan masing-masing.

Berdasarkan berbagai model implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemilihan model implementasi kebijakan George C. Edward III didasarkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini relevan untuk menganalisis pengelolaan sampah karena berkaitan dengan kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan efektivitas birokrasi.

4. Strategi

Menurut Arman Maulana (2023:7) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. Menurut Ismail Solihin dalam (Arman Maulana, 2023:7) Strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep management strategi mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategi yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan.

Gaffar dalam (Fory A. Naway, 2016:5) bahwa strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetensi.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar tujuannya tercapai.

5. Pengelolaan

Menurut Fory A. Naway (2016:9) pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.

Kemudian Suprianto dan Muhsin dalam (Fory A. Naway, 2016:9) mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu

komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan”.

6. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Chusnul Chotimah (2020:11–12), sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai, serta dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- a. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- b. Sampah dari tempat-tempat umum dan termasuk perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Menurut Yudiyanto, dkk. (2019:9) pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar.

b. Sumber dan Jenis Sampah

Menurut Dwi Indrawati (2021:5-7) payung hukum untuk sampah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan cara mengurangi sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse dan recycle) dan menangani residu dari kegiatan 3R tersebut. Sampah yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sampah kegiatan rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, meliputi rumah tinggal yang dihuni sebuah keluarga atau sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan pemukiman maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Jenis sampah yang dihasilkan dari sumber tersebut adalah sisa makanan yang dominan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, kaca, daun, logam dan terkadang sampah yang berukuran besar yaitu dahan pohon. Selain itu, sumber tersebut menghasilkan sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, dan lain-lain.
 - b. Sampah kegiatan komersial berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel dan sejenisnya. Umumnya sampah yang dihasilkan berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan sisa makanan.
 - c. Sampah pasar tradisional yang menghasilkan sisa sayur, buah dan makanan yang mudah membusuk.
 - d. Sampah kegiatan perkantoran. Sumber sampahnya meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lembaga permasyarakatan. Menghasilkan sampah dari kegiatan rutin perkantoran yaitu kertas dan sisa makanan.
 - e. Sampah hotel dan restoran. Sampah yang dihasilkan berupa sisa sayuran mentah, daging atau ikan, serta sisa makanan matang lainnya.
 - f. Sampah industri dan rumah sakit. Menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, dan plastik.
 - g. Sampah penyapuan jalan dan taman, seperti jalan kota, ruang terbuka hijau, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dan fasilitas umum lainnya. Sampah yang dihasilkan adalah berupa daun atau dahan pohon, pasir, sampah umum dari pejalan kaki, pembungkus plastik, kertas, dan karton.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sampah rumah tangga dan sejenisnya merupakan sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam berbentuk padat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Sampah yang tidak tertangani dapat menyebabkan pencemaran, menurunkan kualitas hidup, dan mengganggu ekosistem.

Peraturan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, seperti pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

8. Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara

Desa Sungai Turak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Desa Sungai Turak berada pada kawasan yang didominasi oleh lingkungan perairan dan lahan rawa, sehingga aktivitas masyarakatnya tidak terlepas dari kondisi alam tersebut. Sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan kegiatan usaha kecil lainnya. Kondisi ini turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga.

Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Desa Sungai Turak memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Oleh karena itu, Desa Sungai Turak menjadi salah satu lokasi yang relevan untuk penelitian bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan di tingkat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Anita Sari, dkk. (2023;71) kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian mengenai implementasi peraturan ini di Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam (Leo Agustino, 2022:154-159), yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

